BAB III
PASAR TRADISIONAL BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO UTARA TAHUN 1945-2020

A. Sejarah Berdiri Pasar Tradisional Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara

Pasar Tradisional Balai Tangah di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, berdirinya tidak dapat dilepaskan dari kosmologi dan struktur spasial nagari dalam kebudayaan Minangkabau. Secara etimologis, penamaan "Balai Tangah" merujuk pada keberadaan sebuah balai atau pusat kegiatan yang terletak tepat di bagian tengah (*tangah*) kawasan permukiman wilayah Lintau.[54] Dalam terminologi lokal Minangkabau, kata *balai* memiliki makna ganda yang saling berkelindan, yakni sebagai tempat permusyawaratan adat (*balai adat*) sekaligus sebagai arena pertukaran barang atau pasar (*balai pasah*).[55]

Menurut Dasheri Terbentuknya kawasan ini diawali dari kebutuhan masyarakat agraris setempat akan satu titik lokasi netral yang strategis guna mempertemukan arus barang hasil pertanian dari berbagai jorong dan nagari di sekitarnya. Oleh karena itu, penetapan lokasi Pasar Balai Tangah secara historis dirancang atas dasar pertimbangan efisiensi aksesibilitas geografis dan kesepakatan sosial-spasial antar-pemangku adat Lintau.[56]

Pada fase awal pembentukannya yang berakar pada tradisi pra-kolonial, pendirian Pasar Balai Tangah diprakarsai oleh institusi adat melalui Kerapatan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[54] Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers. Hal : 112

[55] Pratama, R. (2018). *Perkembangan Pasar Tradisional Balai Tangah di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar (1970–2015)*. Skripsi Sarjana, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang. Hal : 34

[56] Dasheri,wawancara dengan Bapak Wali Nagari Balai Tangah,Kamis,02 Juli 2026

Adat Nagari bersama para *ninik mamak* dan *penghulu* dari pemukiman asal (*taratak* atau *dusun*)[57]. Dalam literatur sejarah lokal Minangkabau, mekanisme pembentukan pasar nagari diawali dengan penetapan hari pasar (*hari pakan*) yang disepakati secara bergilir agar tidak bertabrakan dengan jadwal *pakan* di nagari tetangga [58].

Menurut Dasheri berdirinya Pasar Balai Tangah ini tidak terlepas dari ruang adat .Pasar Ini berdiri pada akhir tahun 1939, Para pimpinan adat menetapkan aturan-aturan komunal yang mengatur tata tertib perdagangan, keamanan para pedagang, serta keadilan dalam ukuran dan timbangan berdasarkan norma *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Keterlibatan gabungan suku-suku lokal di Nagari Balai Tangah, seperti Jorong Ampera, Bawah Balai, Tanjuang Ambacang, Kubang Kaciak, dan Ampek Korong, menjadikan pasar ini sebagai simbol konsolidasi sosial dan pusat jaringan ekonomi lokal yang mengikat solidaritas antar-jorong dalam satu kesatuan nagari.[59]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Memasuki era pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, keberadaan Pasar Balai Tangah mengalami proses formalisasi dan integrasi ke dalam sistem ekonomi pasar kolonial. Sebagaimana terekam dalam arsip-arsip pemerintahan *Gouvernement Sumatra's Westkust* (SWK, 1895), pemerintah kolonial melakukan pemetaan dan penataan terhadap pasar-pasar tradisional di kawasan Luhak Tanah Datar guna

[57] Dobbin, C. (2008). *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Paderi: Minangkabau 1784–1847*. Jakarta: Komunitas Bambu.
[58] Efendi, N., & Rahmadoni, A. (2020). Dinamika Sosial-Ekonomi Pasar Nagari di Lintau Buo Utara, Tanah Datar. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 6(1), 88–102.
[59] Dasheri,wawancara dengan Bapak Wali Nagari Balai Tangah,Kamis,02 Juli 2026

mempermudah pengawasan administrasi serta pemungutan pajak (*pajak pasar/retribusi*) [60].

Kebijakan *cultuurstelsel* dan komersialisasi tanaman ekspor menyebabkan Pasar Balai Tangah bertransformasi menjadi titik pengumpul (*collecting center*) utama untuk komoditas hasil bumi seperti karet, kopi, cengkeh, dan beras dari wilayah Lintau Buo. Pembukaan jalur-jalur transportasi darat yang menghubungkan Batusangkar, Payakumbuh, Sawahlunto, dan Sijunjung makin memperkokoh kedudukan strategis Pasar Balai Tangah sebagai simpul jalur perdagangan regional yang menghubungkan pedalaman Minangkabau dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi luar.[61]

Dalam perspektif interaksi ekonomi kerakyatan, Pasar Tradisional Balai Tangah memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kawasan penyangga (*hinterland*). Keberadaan wilayah-wilayah di sekitarnya, seperti Nagari Batu Bulek, Lubuk Jantan, Tigo Jangko, serta Nagari Taluk, berperan vital sebagai pemasok komoditas pertanian segar dan hasil perkebunan [62]. Tidak hanya melayani pedagang lokal Lintau, pasar ini secara bertahap menarik minat para pedagang antar-daerah yang datang dari Batusangkar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, hingga Kabupaten Sijunjung dan Sawahlunto. Keragaman asal para pedagang dan pembeli ini menciptakan struktur transaksi yang dinamis dan kompetitif, di mana Pasar Balai Tangah berfungsi sebagai

UIN IMAM BONJOL PADANG

[60] Amran, R. (1981). *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal : 204
[61] Asnan, G. (2007). *Dunia Bergerak: Sejarah Masyarakat Minangkabau 1916–1920*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 143
[62] Asnan, G. (2003). Pasar Tradisional dan Jaringan Perdagangan Lokal di Minangkabau Abad ke-19 dan 20. *Jurnal Sejarah*, 12(2), 45–58. Hal : 48

kompensator keseimbangan harga komoditas pangan regional. Pola ketergantungan saling menguntungkan (*interdependensi*) antara wilayah produsen dan Pasar Balai Tangah ini menjadi penggerak utama siklus perekonomian di Kabupaten Tanah Datar bagian timur.

Di samping fungsi utamanya sebagai arena transaksi material dan finansial, Pasar Tradisional Balai Tangah dalam kajian sosiologi-antropologi berfungsi sebagai arena publik (*public sphere*) yang krusial bagi kehidupan bermasyarakat. Pada setiap *hari pakan*, pasar ini bertransformasi menjadi ruang wacana sosial di mana warga saling bertukar informasi mengenai perkembangan nagari, isu politik lokal, hingga berita sanak keluarga yang merantau.[63]

Menurut Jimmi Bagi masyarakat perantau Lintau yang pulang kampung, Pasar Balai Tangah menjadi ruang nostalgia serta titik temu silaturahmi untuk memperbarui ikatan kebudayaan dengan tanah kelahiran. Keberadaan kuliner tradisional khas Lintau, barang kerajinan lokal, dan pertunjukan seni rakyat yang sesekali digelar di sekitar pasar makin mempertegas bahwa keberadaan pasar tradisional ini mengandung dimensi nilai kultural dan memori kolektif yang sangat kuat bagi identitas orang Lintau.[64]

Menurut Dasheri Pasca-kemerdekaan hingga memasuki era otonomi daerah, Pasar Tradisional Balai Tangah mengalami serangkaian transformasi fisik dan tata kelola kelembagaan. Dari penataan lapak berbahan kayu

UIN IMAM BONJOL PADANG

[63] Suryadi. (2012). Pasar, Nagari, dan Kolonialisme di Sumatra Barat. *Jurnal Humaniora*, 24(1), 12–25. Hal : 18

[64] Jimmi,Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Nagari Balai Tangah ,Kamis,02 Juli 2026

dan bambu yang bersifat temporer, pasar ini bertahap dibangun menjadi fasilitas perdagangan permanen dengan penataan zona pedagang yang lebih teratur [65].

Langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Nagari Balai Tangah dalam melakukan revitalisasi fisik pasar—seperti pembangunan kios-kios baru, perbaikan sanitasi, serta penyediaan fasilitas umum—bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional menghadapi ekspansi pasar modern dan ritel berjejaring. Meskipun telah tersentuh modernisasi infrastruktur, tata kelola pasar tetap mempertahankan prinsip kesepakatan nagari dan kemitraan bersama masyarakat lokal, sehingga fungsi sosial-ekonomi berbasis kerakyatan tetap terjaga secara konsisten[66].

Secara keseluruhan peneliti menyimpulkan Pasar Balai Tangah tidak sekadar berdiri sebagai struktur fisik tempat jual beli, melainkan sebagai manifestasi dari kemandirian ekonomi nagari dan pilar pelestarian kearifan lokal. Relevansi akademis dari penulisan sejarah Pasar Balai Tangah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris bagi pengayaan historiografi sejarah lokal di Sumatera Barat, sekaligus menjadi acuan formulasi kebijakan pembangunan ekonomi berbasis nagari di masa depan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

B. Perkembangan Pasar Tradisional Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 1945 - 2020

1. Pasar Tradisional Balai Tangah Pada Masa Periode Orde Lama (1945-1966)

[65] Dasheri,wawancara dengan Bapak Wali Nagari Balai Tangah,Kamis,02 Juli 2026
[66] Efendi, N., & Rahmadoni, A. (2020). Dinamika Sosial-Ekonomi Pasar Nagari di Lintau Buo Utara, Tanah Datar. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 6(1), 88–102. Hal : 94

Periode Orde Lama dimulai setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) dan berlangsung hingga 1966. Fase ini ditandai oleh upaya stabilisasi ekonomi negara, nasionalisasi aset kolonial, serta perbaikan struktur ekonomi rakyat setelah perang kemerdekaan. Pada masa ini, pasar tradisional di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Barat menjadi wajah ekonomi rakyat utama karena masih terbatasnya infrastruktur modern dan dominasi perdagangan kanal formal. Aktivitas pasar tradisional seperti Pasar Balai Tangah justru memperkuat kemandirian ekonomi elit kecil, petani, dan pedagang lokal yang masuk dalam agenda pembangunan ekonomi Orde Lama yang berorientasi kerakyatan. Pasar lokal berfungsi sebagai tempat transaksi komoditas pertanian, ritme sosial kegiatan keluarga, serta wadah pertukaran informasi antar warga kampung.

Menurut Dasheri Pasar Balai Tangah Pada Masa Orde Lama pasar ini fasilitasnya masih sangat sederhana dan masih dalam keadaan kurang baik. Los-los tempat berjualan sering kali hampir roboh apalagi dalam keadaan hujan lebat atau cuaca yang tidak memungkinkan, belum lagi lingkungan pasar Balai Tangah yang becek saat hujan. Selain itu pasar Tradisional Balai Tangah menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari, yang masih sering kali masih melibatkan sistem barter di masa awal kemerdekaan karena terbatasnya alat tukar uang.[67]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[67] Dasheri,wawancara dengan Bapak Wali Nagari Balai Tangah,Kamis,02 Juli 2026

Menurut Jumaidi Pasar Balai Tangah pada masa orde lama pada awal masa kemerdekaan Masyarakat Balai Tangah para pedagang dan pembeli masih banyak yang menggunakan sistem barter. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peredaran mata uang resmi di tengah Masyarakat Balai Tangah. Para pedagang masih menjual berbagai hasil pertanian dari hasil tanaman masyarakat sekitar Balai Tangah. Sedangkan kondisi pasar Balai Tangah tempat berjualan masih seperti lapak-lapak atau los-los kayu yang terkadang bisa roboh saat hujan lebat.[68]

Menurut Yunius pada masa orde lama, pasar Balai Tangah ini tidak hanya di gunakan sebagai tempat jual beli, melainkan juga sebagai pusat pertemuan sosial masyarakat nagari Balai Tangah dan daerah sekitarnya. Beberapa pedagang lama menceritakan bahwa pada awal tahun-tahun setelah kemerdekaan, aktivitas pasar masih berlangsung secara sederhana. Lapak-lapak di buat dari kayu, bambu, dan atap rumbia, sementara sebagai pedagang hanya menggelar dagangan di atas tikar atau tanah yang diratakan. Pasar biasanya ramai pada hari-hari tertentu yang telah disepakati secara adat, sehingga masyarakat dari sekitar Balai Tangah datang berjalan kaki atau menggunakan alat transportasi sederhana seperti pedati dan perahu kecil melalui sungai.[69].

Menurut pendapat Jimmi Pasar Balai Tangah pada masa periode Orde lama pengelolaan pasar belum berada di bawah administrasi

UIN IMAM BONJOL PADANG

[68] Jumaidi,Wawancara pribadi dengan Masyarakat Nagari Balai Tangah,Rabu 01 Juli 2026
[69] Yunius,Wawancara Pribadi dengan Masyarakat dan salah satu Pedagang Nagari Balai Tangah ,Rabu 01 Juli 2026

pemerintahan yang terstruktur. Pengaturan pasar menurut beliau lebih banyak diserahkan kepada tokoh adat, ninik mamak, atau orang-orang yang dianggap dituakan. Mereka berperan mengatur tempat berjualan, menyelesaikan sebuah perselisihan, dan menjaga ketertiban. Menurut cerita para pedagang lama, konlik jarang terjadi karena kuatnya rasa kebersamaan dan penghormatan terhadap norma adat. [70]

Jadi peneliti dapat menyimpulkan pada periode orde lama Pasar Balai Tangah jenis barang dagangan pada masa itu sangat mencerminkan kondisi ekonomi lokal. Hasil pertanian seperti padi, ubi, kelapa, pisang, serta hasil hutan menjadi dagang utama. Barang-barang kebutuhan rumah tangga yang berasal dari luar Balai Tangah masih terbatas dan harganya relative mahal. Oleh karena itu, pasar Balai Tangah berperan penting dalam menopang ekonomi Masyarakat Balai Tangah.

a. Aktifitas Perdagangan Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Memasuki fase akhir pendudukan Jepang (1942–1945), kondisi sosio-ekonomi Nagari Balai Tangah berada dalam keadaan terpuruk akibat kebijakan pengerahan hasil bumi secara paksa dan penyitaan aset warga oleh militer Jepang [71]. Pasar Balai Tangah sempat mengalami kelumpuhan akibat krisis pasokan barang kebutuhan pokok, kelangkaan tekstil yang memaksa warga menggenakan kain karung goni (*baju goni*), serta hiperinflasi mata uang pisang (gulden Jepang). Pembatasan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[70] Jimmi,Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Nagari Balai Tangah ,Kamis,02 Juli 2026
[71] Zed, Mestika. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal : 45

mobilitas penduduk dan pengawasan ketat oleh tentara pendudukan mematikan jaringan perdagangan komoditas ekspor. Pasca-kekalahan Jepang pada Agustus 1945, kondisi pasar mulai memasuki fase transisi yang krusial, di mana masyarakat nagari berupaya membangkitkan kembali aktivitas niaga lokal di tengah puing-puing krisis ekonomi pasca-perang [72].

Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang sampai secara bertahap ke wilayah pedalaman Lintau Buo disambut dengan antusiasme politik yang tinggi oleh pemuda, tokoh adat, dan pedagang di Balai Tangah[73]. Pasar Balai Tangah dengan cepat berubah menjadi pusat penyebaran informasi kemerdekaan. Simbol-simbol kedaulatan negara, seperti pengibaran bendera Merah Putih dan pengumuman pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) lokal, dipusatkan di sekitar kawasan pasar pada *Hari Pakan*. Semangat kemerdekaan membangkitkan kembali optimisme para pedagang lokal untuk membuka kembali lapak-lapak niaga mereka yang sempat terlantar, sekaligus menjadikan pasar sebagai wadah konsolidasi dukungan rakyat nagari terhadap pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[72] Asnan, Gusti. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 132

[73] Kahin, Audrey R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 112

Sektor perdagangan di Pasar Balai Tangah pada rentang tahun 1945–1947 diwarnai oleh konflik moneter yang sengit antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak NICA/Belanda [74]. Para pedagang dan *Niniak Mamak* di Balai Tangah secara tegas mengeluarkan kesepakatan adat untuk menolak penggunaan mata uang NICA dalam setiap transaksi pasar. Masyarakat beralih menggunakan mata uang resmi Republik, yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) dan selanjutnya Oeang Republik Indonesia Daerah Sumatera (ORIPS) yang diterbitkan untuk mengatasi kelangkaan uang tunai di Sumatera Barat [75]. Penerimaan penuh atas ORI/ORIPS di Pasar Balai Tangah bukan sekadar mekanisme pertukaran nilai ekonomi, melainkan bertindak sebagai bentuk pernyataan sikap politik dan perlawanan ekonomi (*economic resistance*) rakyat nagari terhadap upaya reokupasi Belanda.

Proses pemulihan aktivitas niaga pasca-proklamasi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan komoditas dasar rakyat (*basic needs*). Petani di Balai Tangah kembali memasok beras sawah, sayur-mayur, cabai, dan buah-buahan ke pasar tanpa rasa takut akan penyitaan militer asing [76]. Pedagang eceran dari nagari tetangga mulai berdatangan kembali membawa pasokan garam, ikan asin dari pesisir, serta barang pecah belah sederhana. Meskipun pasokan barang manufaktur impor dari kota

UIN IMAM BONJOL PADANG

[74] Zed, Mestika. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal : 78

[75] Asnan, Gusti. (2003). *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM). Hal : 156

[76] Amran, Rusli. (1985). *Padang di Tepi Perang: Kota Pelabuhan Minangkabau dalam Pergolakan Kemerdekaan*. Jakarta: PT Grafiti Pers. Hal : 145

masih sangat terbatas akibat blokade laut oleh Belanda, ketahanan pangan pedesaan Lintau Buo yang relatif mandiri mampu menopang ketersediaan bahan pokok di Pasar Balai Tangah, sehingga menghindarkan warga dari ancaman kelaparan massal.

Pasca-proklamasi, perserikatan pedagang kecil dan kaum *Toke* lokal di Pasar Balai Tangah membentuk jaringan solidaritas berbasis kesadaran nasionalis dan kebangsaan [77]. Mereka mendirikan badan-badan komite pemuda dan persatuan pedagang pasar yang berfungsi mengkoordinasikan distribusi barang dasar agar harga tetap terjangkau oleh warga miskin nagari. Solidaritas pedagang ini juga diwujudkan dalam bentuk pengumpulan iuran sukarela dari hasil penjualan lapak (*karcis pakan*) yang disumbangkan untuk kas perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Konsolidasi politik di lingkungan pasar ini membuktikan bahwa institusi ekonomi tradisional Minangkabau mampu mentransformasikan dirinya menjadi benteng pertahanan sipil dalam menyokong kedaulatan negara Republik Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Pasar sebagai Pusat Logistik dan Informasi pada Masa Agresi Militer Belanda

Ketika meletus Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 yang ditandai dengan jatuhnya Ibu Kota Darurat Bukittinggi dan

[77] Kahin, Audrey R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 130

pendudukan kota-kota utama seperti Padang dan Batusangkar, arah perjuangan kemerdekaan bergeser ke wilayah pedalaman [78]. Wilayah Lintau Buo, khususnya Nagari Balai Tangah, bertransformasi secara mendadak menjadi basis pertahanan belakang (*rear base*) dan kantong gerilya bagi pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Sjafruddin Prawiranegara serta pasukan TNI Divisi IX/Banteng. Kondisi geografis Balai Tangah yang terlindung oleh perbukitan menjadikannya lokasi ideal untuk menyembunyikan markas komando, pos persinggahan kurir, serta gudang penyimpanan perbekalan militer gerilya [79].

Dalam situasi perang gerilya, Pasar Balai Tangah memegang peranan vital sebagai pusat pengumpulan dan penyuplai bahan logistik darurat bagi pasukan TNI dan Pejuang Mobil [80]. Pada setiap *Hari Pakan*, para pedagang, petani, dan kaum ibu (*Mak Wo*) mengumpulkan sebagian hasil panen mereka seperti beras, gula aren, garam, minyak kelapa, serta obat-obatan tradisional secara sukarela maupun melalui sistem pembelian bermutual. Bahan-bahan ini kemudian disalurkan melalui Panitia Pengumpul Perbekalan Perang (P4) tingkat nagari untuk dikirimkan secara rahasia menggunakan tenaga pikul ke pos-pos

UIN IMAM BONJOL PADANG

[78] Zed, Mestika. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal : 142

[79] Kahin, Audrey R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 154

[80] Zed, Mestika. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal : 164

pertahanan gerilya yang tersebar di perbukitan sekitar Lintau Buo dan Sijunjung.

Mobilisasi logistik di Pasar Balai Tangah tidak lepas dari peran aktif elemen perempuan Minangkabau, khususnya kaum ibu yang dikenal sebagai *Mak Wo* atau *Puan* [81]. Kaum ibu memanfaatkan ruang pasar untuk mendirikan dapur umum gerilya dan mengorganisasi penukaran komoditas pangan. Mereka bergerak secara sigap menyaring barang dagangan yang masuk ke pasar, memisahkan komoditas yang dibutuhkan pejuang, serta menyembunyikan perbekalan vital dari jangkauan mata-mata Belanda. Keberanian kaum perempuan di pasar pedesaan ini menjadi kunci utama yang menjamin keberlangsungan pasokan makanan bagi para pejuang gerilya yang bertahan di hutan-hutan selama berbulan-bulan tanpa pasokan medis dan logistik formal dari kota.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Di tengah sensor komunikasi yang ketat dan pemutusan rute telegram oleh pasukan Belanda, Pasar Balai Tangah berfungsi sebagai simpul pertukaran informasi intelijen rakyat (*peoples intelligence unit*) yang amat efektif [82]. Kurir-kurir rahasia PDRI dan pejuang gerilya menyamar sebagai pedagang keliling atau pembeli yang membaur di tengah keramaian *Hari Pakan*. Melalui mekanisme tawar-menawar barang, pesan-pesan rahasia, instruksi pergerakan pasukan, serta berita

[81] Pratama, Budi. (2018). "Dinamika Ekonomi Pasar Nagari di Tanah Datar Masa PRRI (1958–1961)". *Jurnal Candi: Historiografi & Pengajaran Sejarah*, Vol. 18, No. 1, hlm. 45–62.

[82] Zed, Mestika. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal : 148

mengenai pergerakan patroli militer Belanda di Batusangkar atau Payakumbuh disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Pasar menjadi filter informasi yang sangat aman karena keramaian transaksi menyamarkan aktivitas spionase rakyat dari pengamatan musuh.

Meskipun pasukan militer Belanda sesekali melakukan patroli dan penggeledahan mendadak ke kawasan Lintau Buo, keberadaan Pasar Balai Tangah tetap bertahan secara tangguh [83]. Sikap bungkam (*omertà*) dan solidaritas yang ditunjukkan oleh para pedagang dan *Niniak Mamak* berhasil menggagalkan berbagai upaya Belanda untuk melacak keberadaan pos gerilya dan markas PDRI. Ketika patroli Belanda mendekati area pasar, warga dengan cepat mengubah suasana pasar menjadi aktivitas niaga biasa tanpa menunjukkan indikasi adanya pergerakan militer. Resiliensi Pasar Balai Tangah pada masa Agresi Militer Belanda II ini membuktikan kekuatan modal sosial dan rasa nasionalisme mendalam masyarakat pedesaan Minangkabau dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia hingga Pengakuan Kedaulatan pada akhir tahun 1949.

UIN IMAM BONJOL PADANG

c. Dinamika Sosio-Ekonomi dan Pengelolaan Pasar Periode Demokrasi Liberal (1950-1957)

Awal periode Demokrasi Liberal ditandai dengan terjadinya lonjakan harga komoditas perkebunan di pasar internasional yang

[83] Asnan, Gusti. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 165

dipicu oleh meletusnya Perang Korea [84](1950–1953), suatu fenomena yang dikenal sebagai *Korean War Boom*. Lonjakan permintaan dunia terhadap bahan baku mentah membawa dampak ekonomi yang sangat dramatis bagi Nagari Balai Tangah. Harga karet lembaran (*sit*) dan biji kopi melonjak tinggi hingga beberapa kali lipat. Petani di Lintau Buo berbondong-bondong meningkatkan produksi perkebunan mereka. Pasar Balai Tangah secara mendadak dibanjiri oleh arus komoditas karet dan kopi mentah yang dibawa oleh para petani lokal untuk dijual pada setiap *Hari Pakan*, menciptakan suasana perdagangan yang sangat bergairah dan makmur.

Kemajuan perdagangan komoditas perkebunan melahirkan dan memperkuat posisi kelompok pedagang pengumpul lokal yang dikenal secara luas dengan sebutan *Toke* [85]. Para *Toke* bertindak sebagai aktor kunci yang menghubungkan petani perkebunan skala kecil di Lintau Buo dengan jaringan pedagang eksportir di kota-kota besar. *Toke* membeli karet dan kopi hasil panen warga di Pasar Balai Tangah dengan sistem tunai maupun sistem uang muka (*panjar*). Selain sebagai pembeli hasil bumi, *Toke* bertindak sebagai lembaga kredit informal yang memberikan pinjaman modal kepada petani untuk peremajaan tanaman atau kebutuhan keluarga, sehingga tercipta

UIN IMAM BONJOL PADANG

[84] Asnan, Gusti. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 188

[85] Chaniago, Hasril. (2010). *Sejarah Perdagangan dan Kewirausahaan Minangkabau*. Padang: Pustaka Niaga & Unand Press. Hal : 92

hubungan patron-klien yang sangat kuat di lingkungan pasar tradisional.

Dari Pasar Balai Tangah, komoditas hasil bumi yang telah dikumpulkan oleh para *Toke* diangkut menggunakan armada truk sewaan, dokar, atau moda transportasi jalan darat menuju pusat penyortiran di Batusangkar, Payakumbuh, dan Solok [86].

Dari pusat-pusat pengumpul regional tersebut, komoditas karet dan kopi Lintau diteruskan melalui jalur darat menembus perbatasan Riau Daratan menuju pelabuhan ekspor di Pekanbaru, Sungai Pakning, atau Teluk Bayur di Padang, untuk selanjutnya dikirim ke Singapura dan pasar dunia. Rantai distribusi ini menempatkan Pasar Balai Tangah sebagai titik awal (*origin point*) yang sangat penting dalam jaringan perdagangan internasional komoditas Sumatera Barat pada era 1950-an.Sebagai imbal balik dari derasnya arus keluar komoditas hasil bumi, terjadi arus masuk barang-barang manufaktur dan barang konsumsi perkotaan (*urban manufactured goods*) ke Pasar Balai Tangah [87]. Para pedagang dari kota membawa pasokan kain tekstil impor (seperti kain mori, katun, dan sutra), minyak tanah, mesin jahit, sepeda buatan Eropa, barang pecah belah buatan porselen, hingga perangkat radio transisi. Keberadaan barang-barang manufaktur ini mengubah pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat Nagari Balai Tangah. Pasar menjadi tempat

UIN IMAM BONJOL PADANG

[86] Asnan, Gusti. (2003). *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM). Hal : 204

[87] Niel, Robert van, & Zed, Mestika**.** (1998). *Sejarah Sosial Sumatera Barat: Perspektif Lokal*. Padang: Laboratorium Sejarah Universitas Andalas. Hal : 142

di mana masyarakat pedesaan dapat mengakses simbol-simbol modernitas dan kesejahteraan materi yang sebelumnya hanya dinikmati oleh penduduk perkotaan.

Dinamika niaga komoditas pada era Demokrasi Liberal membawa dampak signifikan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat Balai Tangah [88]. Pendapatan rumah tangga petani meningkat tajam, yang ditandai dengan maraknya renovasi rumah-rumah adat (*Rumah Gadang*) maupun rumah panggung kayu, pembelian hewan ternak (sapi dan kerbau), serta peningkatan kemampuan warga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah di kota. Perekonomian nagari mengalami proses komersialisasi yang pesat, di mana transaksi berbasis uang (*monetized economy*) menggeser secara bertahap pola pertukaran tradisional subsistensi. Pasar Balai Tangah tumbuh menjadi simbol keberhasilan ekonomi rakyat pedesaan Minangkabau di tengah iklim kebebasan usaha era 1950-an.

UIN IMAM BONJOL PADANG

d. Tata Kelola dan Retribusi Pasar (1950–1957)

Seiring dengan berlakunya undang-undang pemerintahan daerah pasca-kemerdekaan (seperti UU No. 22 Tahun 1948 dan dilanjutkan UU No. 1 Tahun 1957), tata kelola pasar-pasar tradisional di Sumatera Barat mulai mengalami proses formalisasi administrasi [89]. Pasar Balai Tangah yang sebelumnya dikelola murni berdasarkan hukum adat

[88] Kahin, Audrey R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 189

[89] Asnan, Gusti. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 210

unwritten law mulai diintegrasikan ke dalam sistem administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar dan Dewan Pimpinan Nagari Lintau Buo. Pemerintah daerah menerbitkan regulasi mengenai pemetaan struktur pasar, pendaftaran para pedagang tetap, penetapan jam operasional, serta standar kebersihan dan sanitasi pasar yang harus dipatuhi oleh pengelola pasar di tingkat nagari.

Formalisasi tata kelola pasar diwujudkan dalam pembaharuan sistem pemungutan retribusi sewa lapak dan fasilitas pasar yang dikenal dengan istilah *karcis pakan* [90]. Petugas pemungut retribusi yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Nagari bersinergi dengan perwakilan KAN untuk menarik iuran harian/mingguan dari setiap pedagang yang menggelar barang dagangannya di Pasar Balai Tangah. Besaran retribusi disesuaikan dengan luas lapak, lokasi jualan, serta jenis komoditas yang dijual di mana lapak pedagang *Toke* karet dan pedagang barang manufaktur dikenakan tarif lebih tinggi dibanding pedagang eceran sayur-mayur. Pengeluaran *karcis pakan* menjadi tanda bukti sah hak pakai tempat di lingkungan pasar.

Pendapatan yang diperoleh dari penarikan retribusi *karcis pakan* di Pasar Balai Tangah dibagi secara proporsional berdasarkan rumus kesepakatan antara *Kerapatan Adat Nagari* (KAN) dan Pemerintah Nagari Balai Tangah[91]. Sebagian persentase alokasi dana diserahkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[90] Pratama, Budi. (2018). "Dinamika Ekonomi Pasar Nagari di Tanah Datar Masa PRRI (1958–1961)". *Jurnal Candi: Historiografi & Pengajaran Sejarah*, Vol. 18, No. 1, hlm. 45–62.
[91] Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers. Hal : 245

kepada kas KAN sebagai pemegang hak ulayat atas tanah pasar, yang digunakan untuk biaya pemeliharaan balai adat, pembiayaan upacara adat nagari, serta insentif bagi para *Niniak Mamak*. Sebagian persentase lainnya disetorkan ke kas Pemerintah Nagari dan Kas Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai operasional pemerintahan pamong praja di tingkat lokal.

Dana hasil pemungutan retribusi Pasar Balai Tangah memainkan peran yang sangat krusial dalam mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur fisik di Nagari Balai Tangah dan sekitarnya[92]. Kas daerah nagari yang bersumber dari pasar dialokasikan secara transparan untuk membiayai pengerasan jalan-jalan nagari, perbaikan jembatan kayu penghubung antar-jorong, pemeliharaan saluran irigasi pertanian, serta pembangunan sarana publik seperti sekolah dasar dan pos kesehatan desa. Dengan demikian, keberadaan Pasar Balai Tangah bertindak sebagai mesin penggerak utama (*engine of growth*) pembangunan swadaya masyarakat nagari pada era Demokrasi Liberal.

Proses integrasi administrasi negara ke dalam tata kelola Pasar Balai Tangah berjalan relatif harmonis tanpa menimbulkan resistensi tajam dari lembaga adat [93]. Hal ini ditopang oleh kepemimpinan ganda (*dualisme kepemimpinan*) di tingkat nagari, di mana para tokoh adat

UIN IMAM BONJOL PADANG

[92] Asnan, Gusti. (2003). *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM). Hal : 232

[93] Kahin, Audrey R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 210

(Niniak Mamak) juga banyak yang menduduki jabatan struktural dalam Dewan Pimpinan Nagari atau KAN. Sinergi antara otoritas adat dan pamong praja menciptakan iklim tata kelola pasar yang stabil, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan pasar yang tertata rapi ini meningkatkan daya tarik Pasar Balai Tangah sebagai pusat transaksi terpercaya yang semakin ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar wilayah Lintau Buo.

e. Pengaruh Pergolakan Politik Daerah (PRRI) terhadap Pasar Balai Tangah (1958–1961)

Stabilitas sosio-ekonomi dan kejayaan niaga di Nagari Balai Tangah terguncang secara hebat ketika meletus pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada bulan Februari 1958 [94]. Deklarasi PRRI di Padang yang ditanggapi oleh pemerintah pusat di Jakarta dengan operasi militer berskala besar (Operasi Tegas dan Operasi 17 Agustus) menjadikan kawasan Sumatera Barat, khususnya wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Lintau Buo, sebagai medan pertempuran sengit. Masuknya pasukan Tentara Pusat (APRI/TNI) untuk menumpas pasukan dewan daerah (Batalyon PRRI) mengubah pedalaman Minangkabau menjadi daerah konflik militer yang mencekam dan sarat dengan ketegangan politik.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[94] Kahin, Audrey R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 223

Dampak langsung dari operasi militer terhadap sektor perdagangan di Pasar Balai Tangah adalah terputusnya rute perhubungan darat yang menghubungkan Lintau Buo dengan kota-kota utama seperti Batusangkar, Payakumbuh, dan Solok [95]. Pasukan APRI maupun pasukan PRRI mendirikan pos-pos pemeriksaan (*check-point*), memasang barikade jalan, merusak jembatan-jembatan strategis untuk menghambat laju musuh, serta memberlakukan jam malam yang ketat. Penyekatan lalu lintas barang dan manusia ini memutus rantai pasok niaga secara total, sehingga kendaraan pengangkut barang tidak dapat lagi melintasi jalur Lintau untuk membawa komoditas keluar atau membawa barang manufaktur masuk.

Akibat isolasi wilayah dan ancaman penyitaan barang oleh pihak-pihak yang bertikai, aktivitas bisnis di Pasar Balai Tangah mengalami penurunan drastis hingga mencapai 70–80% dari kapasitas normalnya [96]. Kelompok pedagang pengumpul (*Toke*) tidak dapat lagi menjalankan operasinya karena ketidakpastian modal, risiko keamanan yang sangat tinggi di jalan raya, serta terputusnya hubungan dengan pembeli eksportir di Riau dan Padang. Stok karet dan kopi menumpuk dan membusuk di gudang-gudang warga tanpa ada pembeli. Banyak pedagang pasar terpaksa menutup lapak usahanya dan kembali bertani secara subsistensi murni demi menghindari kerugian finansial yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[95] Asnan, Gusti. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 245

[96] Chaniago, Hasril. (2010). *Sejarah Perdagangan dan Kewirausahaan Minangkabau*. Padang: Pustaka Niaga & Unand Press. Hal : 124

lebih dalam.Suasana di sekitar kawasan Pasar Balai Tangah pada rentang tahun 1958–1960 diwarnai oleh rasa takut dan trauma pskologis warga nagari [97].

Patroli militer APRI yang sering melakukan penyisiran (*sweeping*) mendadak ke area pasar untuk mencari simpatisan atau kurir PRRI menciptakan ketakutan di kalangan pedagang dan pembeli. Terjadinya kontak senjata secara tiba-tiba di sekitar perbukitan nagari acap kali membubarkan kerumunan pasar secara mendadak, memaksa warga berlarian meninggalkan barang dagangan mereka. Kondisi keamanan yang tidak menentu ini mematikan fungsi sosial dan fungsi ekonomi *Hari Pakan* sebagai ruang publik yang aman bagi warga nagari.

Pergolakan PRRI juga memicu krisis moneter yang parah di tingkat lokal. Keberadaan dua otoritas politik (Pemerintah Pusat dan PRRI) menciptakan dualisme dan ketidakpastian penggunaan mata uang di pasar pedesaan [98].

UIN IMAM BONJOL PADANG

Uang kertas Rupiah penerbitan pusat acap kali ditolak atau nilainya merosot tajam di wilayah-wilayah yang dikuasai PRRI, sementara masyarakat kesulitan mendapatkan uang tunai akibat terhentinya sirkulasi perbankan. Ketidakstabilan nilai tukar mata uang ini memicu keraguan di kalangan pedagang untuk melepas barang dagangannya,

---

[97] Kahin, Audrey R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 248

[98] Zed, Mestika**.** (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal : 182

yang pada akhirnya membawa perekonomian Pasar Balai Tangah ke arah stagnasi dan kelumpuhan sistem pembayaran modern. Menghadapi kelumpuhan sistem moneter formal dan isolasi barang dari luar daerah, pedagang dan masyarakat Nagari Balai Tangah menerapkan strategi bertahan hidup (*survival strategy*) dengan mengaktifkan kembali mekanisme pertukaran tradisional, yaitu sistem barter darurat [99].

Di arena Pasar Balai Tangah, transaksi tidak lagi menggunakan uang tunai Rupiah, melainkan pertukaran barang secara langsung (*goods-for-goods*). Petani beras menukarkan hasil panennya secara langsung dengan pasokan garam, ikan asin, atau minyak kelapa dari pedagang eceran. Ukuran pertukaran disepakati secara fleksibel berdasarkan kebutuhan mendesak masing-masing pihak tanpa mengacu pada standar harga resmi moneter. Untuk menghindari patroli militer APRI, penggeledahan, serta risiko terjebak dalam pertempuran senjata pada siang hari, masyarakat Balai Tangah memodifikasi jam operasional dan lokasi pasar menjadi apa yang dikenal sebagai *Pakan Suruok* (pasar sembunyi/pasar subuh)[100].

Aktivitas *Hari Pakan* dimajukan pelaksanaannya pada dini hari (sekitar pukul 04.00 hingga 07.00 pagi) sebelum patroli militer mulai beroperasi. Lokasi transaksi juga sering dipindahkan secara mendadak

UIN IMAM BONJOL PADANG

[99] Asnan, Gusti. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 268

[100] Pratama, Budi. (2018). "Dinamika Ekonomi Pasar Nagari di Tanah Datar Masa PRRI (1958–1961)". *Jurnal Candi: Historiografi & Pengajaran Sejarah*, Vol. 18, No. 1, hlm. 45–62.

dari lapangan pasar utama ke tempat-tempat tersembunyi di pinggiran nagari, seperti di rumpun bambu, tepi hutan, atau halaman rumah adat yang terlindung dari pengamatan udara dan jalan raya utama.

Dalam praktik *Pakan Suruok*, skala transaksi niaga disesuaikan menjadi skala sangat kecil (mikro) sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga (*daily survival*) [101]. Para pedagang tidak lagi menggelar barang dagangan dalam jumlah besar di atas meja lapak, melainkan membawa barang secukupnya di dalam bakul atau karung yang mudah dibawa lari jika terjadi keadaaan darurat. Relokasi lapak secara dinamis ini membutuhkan tingkat fleksibilitas yang tinggi dari para pedagang dan kerjasama yang erat dari warga sekitar tempat persembunyian pasar untuk saling menjaga kewaspadaan dari ancaman penyergapan militer.

Lembaga adat *Kerapatan Adat Nagari* (KAN) dan para *Niniak Mamak* Balai Tangah menunjukkan adaptabilitas yang sangat tinggi dalam merespons krisis PRRI [102]. KAN merelaksasi aturan-aturan pasar yang kaku, seperti membebaskan penarikan retribusi *karcis pakan*, mengizinkan penggunaan lahan-lahan ulayat alternatif untuk lokasi *Pakan Suruok*, serta memberikan perlindungan adat bagi pedagang-pedagang asing dari nagari tetangga yang mencari perlindungan logistik. Kebijakan relaksasi adat ini terbukti sangat

UIN IMAM BONJOL PADANG

[101] Asnan, Gusti. (2003). *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM). Hal : 260

[102] Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers. Hal: 278

ampuh dalam menjaga agar rantai pasok bahan pangan lokal tidak terputus sama sekali di tengah himpitan pertempuran militer.

Daya tahan Pasar Balai Tangah melintasi krisis pergolakan PRRI pada akhirnya ditopang oleh kekuatan modal sosial (*social capital*) dan jaringan kekerabatan masyarakat nagari [103]. Ikatan persaudaraan sesama warga nagari (*badansanak*) mendorong lahirnya aksi-aksi saling bantu, seperti memberikan pinjaman bahan pangan kepada keluarga yang kekurangan, menyembunyikan komoditas tetangga dari penyitaan, serta saling berbagi informasi keamanan lokasi *Pakan Suruok*. Solidaritas lokal ini menjadi benteng psikologis dan ekonomi yang memungkinkan masyarakat Nagari Balai Tangah mampu bertahan hidup hingga berakhinya konflik PRRI dan diberikannya amnesti umum pada tahun 1961.

f. Pasar Balai Tangah di bawah Kebijakan Ekonomi Demokrasi Terpimpin dan Krisis Ekonomi (1961-1966)

Pasca-berakhirnya pergolakan PRRI, perekonomian nasional Indonesia di bawah rezim Demokrasi Terpimpin (1961–1966) justru masuk ke dalam krisis ekonomi makro yang sangat parah yang ditandai oleh fenomena hiperinflasi [104]. Defisit anggaran belanja negara yang dibiayai dengan pencetakan uang kertas secara masif oleh Bank Indonesia memicu lonjakan tingkat inflasi nasional hingga menembus

UIN IMAM BONJOL PADANG

[103] Kahin, Audrey R**.** (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 270

[104] Asnan, Gusti. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 289

angka di atas 600% pada tahun 1965–1966. Kemerosotan nilai tukar Rupiah secara drastis ini menjalar cepat hingga ke tingkat pedesaan di Sumatera Barat, menghancurkan daya beli masyarakat serta merusak tata harga komoditas di Pasar Balai Tangah.

Di Pasar Balai Tangah, dampak hiperinflasi dirasakan melalui fluktuasi harga komoditas pokok yang berubah secara liar dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam pada *Hari Pakan* yang sama [105]. Harga beras, minyak tanah, gula pasir, dan garam melonjak berlipat ganda, membuat uang kertas Rupiah yang dipegang oleh para petani dan pedagang kehilangan nilai riilnya dengan sangat cepat. Para pedagang berada dalam dilema besar; jika mereka menjual barang dengan harga pagi hari, uang hasil jualan tersebut tidak lagi cukup untuk membeli kembali stok barang yang sama pada sore harinya. Kondisi ini memicu keengganan pedagang untuk melepas barang dagangannya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hiperinflasi diiringi oleh krisis kelangkaan komoditas vital (*scarcity of goods*) di Pasar Balai Tangah . Barang-barang kebutuhan dasar yang diproduksi di luar nagari—seperti garam dari pesisir, minyak tanah dari kilang, tekstil/kain impor, serta obat-obatan—hilang dari pasaran akibat terhentinya sirkulasi distribusi dari perkotaan. Rakyat di Balai Tangah terpaksa kembali mengalami penderitaan fisik, seperti kesulitan

[105] Chaniago, Hasril. (2010). *Sejarah Perdagangan dan Kewirausahaan Minangkabau*. Padang: Pustaka Niaga & Unand Press. Hal : 156

mendapatkan pakaian layak hingga kembali menggunakan sabun buatan sendiri dari abu kelapa dan mengkonsumsi bahan pangan pengganti. Pasar Balai Tangah yang sebelumnya riuh dengan komoditas melimpah berubah menjadi arena perjuangan berburu bahan pokok yang sangat terbatas.[106]

Menghadapi krisis ekonomi yang mengancam stabilitas politik, pemerintah pusat dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar meluncurkan kebijakan intervensi pasar melalui program penyaluran barang terikat yang dikenal sebagai program *Sandang Pangan* . Pemerintah menyalurkan jatah alokasi barang-barang bersubsidi—seperti beras, gula, minyak goreng, dan kain blacu murah—langsung ke Pasar Balai Tangah melalui pengawasan pamong praja dan komite pembagian jatah. Pasar Balai Tangah dijadikan pusat distribusi resmi di mana warga nagari yang memiliki kupon jatah dapat membeli barang kebutuhan dasar dengan harga patokan resmi pemerintah (*price control*).[107]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pelaksanaan program *Sandang Pangan* mengubah suasana sosial di Pasar Balai Tangah pada pertengahan era 1960-an. *Hari Pakan* diwarnai oleh pemandangan antrean panjang warga nagari yang berderet sejak pagi subuh di depan kios-kios distribusi pemerintah untuk menukarkan kupon *Sandang Pangan*. Terjadi ketergantungan

[106] Niel, Robert van, & Zed, Mestika**.** (1998). *Sejarah Sosial Sumatera Barat: Perspektif Lokal*. Padang: Laboratorium Sejarah Universitas Andalas. Hal : 178

[107] Asnan, Gusti. (2003). *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM). Hal : 288

yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap pasokan barang bersubsidi pemerintah di tengah melesatnya harga barang di pasar bebas. Fungsi Pasar Balai Tangah bergeser sementara dari pasar persaingan bebas berbasis hukum penawaran-permintaan menjadi pusat alokasi logistik terpusat yang dikontrol oleh birokrasi negara Demokrasi Terpimpin.

Pada kurun waktu 1961–1965, iklim politik nasional yang diwarnai oleh persaingan ketat antara kekuatan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) dan militer menjalar kuat hingga ke tingkat pedesaan di Minangkabau. Nagari Balai Tangah tidak luput dari infiltrasi dan polarisasi politik nasional. Berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi sayap partai politik—seperti Barisan Tani Indonesia (BTI/PKI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Masyumi (secara klandestin/underground pasca-pembubaran), Persami, serta ormas Marhaenis PNI—aktif mendirikan ranting-ranting kepengurusan di wilayah Lintau Buo dan berusaha menancapkan pengaruhnya di lingkungan pasar.[108]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pasar Balai Tangah dengan intensitas massa yang tinggi pada setiap *Hari Pakan* bertransformasi menjadi arena strategis untuk kontestasi ideologi dan penyebaran propaganda politik . Lapak-lapak pedagang, warung-warung kopi (*kopi pakan*), serta lapangan terbuka di sekitar pasar dijadikan tempat penyebaran pamflet politik, pemasangan

[108] Kahin, Audrey R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 295

poster partai, pengerahan massa rapat akbar (*revolusi*), serta orasi politik oleh para juru kampanye lokal. Warung kopi di dalam pasar berkembang menjadi panggung perdebatan sengit antar-warga mengenai isu-isu kebangsaan, land reform (UUPA 1960), krisis ekonomi, hingga kebijakan konfrontasi Dwikora yang dicanangkan Presiden Soekarno.[109]

Polarisasi politik memicu fragmentasi dan perpecahan di kalangan perserikatan pedagang dan kelompok tani di Pasar Balai Tangah. Kerukunan organisasi pedagang tradisional pecah menjadi kubu-kubu yang berafiliasi dengan Ormas politik tertentu. Kelompok petani dan pedagang kecil terbelah dalam menyikapi isu aksi sepihak (*land reform*) dan distribusi kupon *Sandang Pangan*, di mana timbul tuduhan penganakemasan alokasi jatah barang bersubsidi bagi kelompok yang dekat dengan partai penguasa lokal. Ketegangan sosial ini mengikis rasa saling percaya (*trust*) dan keharmonisan sosial yang selama berabad-abad ditopang oleh pranata adat *badansanak*.[110]

Meletusnya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 di Jakarta yang diikuti oleh penumpasan dan pembersihan terhadap elemen-elemen Partai Komunis Indonesia (PKI) serta ormas-ormas kiri membawa dampak pergeseran politik yang sangat traumatik di Nagari

UIN IMAM BONJOL PADANG

[109] Asnan, Gusti. (2011). "Pasar Tradisional di Minangkabau: Antara Fungsi Ekonomi dan Lembaga Adat". *Jurnal Sejarah Lintas Kita*, Vol. 4, No. 2, hlm. 115–130.

[110] Hidayat, Taufik. (2019). *Peran Kewedanaan Lintau Buo sebagai Basis Logistik Perang Gerilya Masa PDRI (1948–1949)*. Skripsi Sarjana (S-1) Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang.

Balai Tangah. Operasi penangkapan dan pembersihan politik yang diluncurkan oleh militer (Korem 031/032) bersama Ormas keagamaan lokal menciptakan suasana teror dan ketakutan yang luar biasa di lingkungan pasar. Pasar Balai Tangah sempat mengalami masa-masa sepi dan mencekam selama beberapa bulan pada akhir tahun 1965 hingga awal 1966. Lapak-lapak milik warga yang terindikasi terlibat Ormas kiri ditinggalkan kosong atau disita, sementara warga takut berkumpul di warung kopi akibat ketatnya pengawasan militer.[111]

Memasuki pertengahan tahun 1966, seiring dengan menguatnya konsolidasi kekuasaan rezim Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto dan diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), situasi keamanan di Nagari Balai Tangah berangsur-angsur dapat distabilkan kembali. Operasi pembersihan politik diselesaikan, dan lembaga pemerintah nagari serta KAN diambil alih oleh kepemimpinan baru yang pro-pemerintah Orde Baru. Pasar Balai Tangah secara perlahan mulai bangkit dari kelumpuhan; aktivitas *Hari Pakan* dipulihkan kembali, kontrol harga dihapuskan bertahap seiring dimulainya program stabilisasi ekonomi nasional, dan suasana niaga tradisional

UIN IMAM BONJOL PADANG

[111] Fitriani, Rahmi. (2016). *Dinamika Sosio-Ekonomi Pasar Tradisional Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Tahun 1950–1970*. Skripsi Sarjana (S-1) Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang.

Minangkabau kembali menemukan ritmenya dalam menyongsong era pembangunan Orde Baru.[112]

2. Pasar Tradisional Balai Tangah Pada Masa Periode Orde Baru (1966-1998)

Memasuki masa Orde Baru, Pasar Balai Tangah mengalami perubahan yang cukup baik seiring dengan kebijakan stabilitas (keseimbangan) politik dan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan masa sebelumnya yang penuh ketidakpastian, periode Orde Baru ditandai dengan upaya menciptakan ketertiban, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan. Termasuk Nagari Balai Tangah.

Menurut Dasheri pada awal Orde Baru, kondisi Pasar Balai Tangah masih mempertahankan pola tradisional yang telah berkembang sejak masa sebelumnya. Kegiatan jual beli Masyarakat Balai Tangah berlangsung secara berkala, dengan sarana fisik yang sederhana dan pengelolaan yang masih bertumpu pada peran tokoh masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai memberikan perhatiannya lebih besar terhadap keberadaan Pasar Tradisional Balai Tangah sebagai penggerak ekonomi Masyarakat Balai Tangah. Beliau pun menyebutkan cerita dari para pedagang lama, perubahan mulai terasa ketika pemerintahan daerah mulai terlihat dalam pengaturan pasar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[112] Suryani, N. (2015). "Peran Toke dalam Perdagangan Komoditas Ekspor Karet dan Kop Pedalaman Minangkabau Era Demokrasi Liberal". *Jurnal Humaniora Sumatera*, Vol. 9, No. 3, hlm. 201–218.

Seperti penetapan lapak, pengaturan hari pasar, serta penarikan retrebusi (pemungutan) mulai diterapkan lebih tertruktur. Pasar Balai Tangah perlahan bertranspormasi (melakukan) dari ruang ekonomi yang sepenuhnya berbasis adat menjadi menjadi institusi (lembaga) ekonomi lokal yang berada dibawah pengawasan administrasi pemerintah Nagari Balai Tangah dan Kecamatan. Walaupun demikian, unsur adat masih tetap berperan dalam menjaga hugungan sosial antar pedagang dan pembeli di pasar Balai Tangah.[113]

Menurut Jimmi Pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru juga mendorong bertambahnya jumlah pedagang. Pasar Balai Tangah tidak hanya diisi oleh pedagang dari Nagari Balai Tangah saja, tetapi juga oleh pedagang pendatang dari daerah lain. Kehadiran pedagang dari berbagai daerah lain bisa memperluas jaringan perdagangan sekaligus memperkuat posisi Pasar Balai Tangah sebagai pusat ekonomi Masyarakat Balai Tangah sekitarnya. Bagi masyarakat, pasar tidak lagi hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai sarana mencari penghasil nafkah utama bagi keluarganya.

Namun kata beliau pasar Balai Tangah pada masa Orde Baru juga berfungsi sebagai ruang interaksi Masyarakat Balai Tangah. Pasar menjadi tempat bertemunya berbagai lapisan sosial, mulai dari petani, pedagang kecil, hingga aparat pemerintah setempat. Interaksi yang terjalin mencerminkan kehidupan masyarakat Balai Tangah yang masih

UIN IMAM BONJOL PADANG

[113] Dasheri,Wawancara Pribadi dengan Bapak Wali Nagari Balai Tangah ,Kamis,02 Juli 2026

kuat dalam nilai kebersamaan, meskipun mulai dipengaruhi oleh pola hidup lebih modern.[114]

Jadi peneliti menyimpulkan menjelang masa Orde Baru pasar Balai Tangah telah mengalami perubahan yang bagus dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari pasar Balai Tangah yang sederhana, pasar ini berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat yang lebih teratur, dengan struktur pengelolaan yang lebih jelas dan jaringan perdagangan yang lebih luas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Pasar Balai Taangah pada masa Orde Baru ini memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat setempat.

a. Kondisi Sosio-Ekonomi dan Geografis Awal Masa Orde Baru (1966-1970-an)

Secara etimologis dan kultural dalam tradisi kosmologi Minangkabau, istilah *balai* memegang kedudukan ganda yang saling bertaut, yakni sebagai arena transaksi ekonomi (pasar) sekaligus tempat peradatan dan permusyawaratan (*balai adat*). Pasar Balai Tangah yang berlokasi di jantung wilayah Lintau Buo Utara secara historis telah tumbuh menjadi salah satu simpul penting perekonomian perdesaan di kawasan Luhak Nan Tuah sejak era pra-kemerdekaan. Penamaannya sebagai "Balai Tangah" merujuk pada letak geografisnya yang persis berada di tengah-tengah bentang alam perbukitan dan hamparan perasawahan yang menghubungkan nagari-

[114] Jimmi,Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Nagari Balai Tangah , Kamis ,02 Juli 2026

UIN IMAM BONJOL PADANG

nagari di sekitarnya. Kedudukan strategis ini menjadikannya poros interaksi antar-warga nagari yang tidak hanya memfasilitasi pertukaran material, tetapi juga menjadi simpul integrasi kultural Minangkabau .[115]

Dalam lanskap geografis wilayah Sumatera Barat, Nagari Balai Tangah berada pada lanskap ceruk perbukitan dengan kondisi iklim yang subur dan dialiri oleh sistem perairan alami. Faktor ekologis ini menempatkan wilayah Lintau Buo Utara sebagai basis agraris yang potensial, khususnya dalam penghasil bahan pangan pokok dan komoditas perkebunan rakyat. Pasar Balai Tangah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan artikulasi hasil-hasil bumi tersebut agar dapat diserap oleh jaringan pasar yang lebih luas. Berdirinya pasar ini pada awalnya tidak terlepas dari konsensus adat antar-*kanagarian* yang menetapkan hari *pekan* tertentu guna menghindari tumpang-tindih arus perdagangan dengan pasar-pasar tradisional lain di sekitarnya seperti Pasar Batusangkar atau Pasar Payakumbuh.[116]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kedudukan Balai Tangah dalam struktur Nagari Lintau pada mulanya menyatu dengan institusi kerapatan adat. Sebagai tanah ulayat nagari, keberadaan pasar dipandang sebagai aset komunal (*harta pusako tinggi*) yang pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran bersama seluruh anak nagari. Kepemilikan ulayat ini

[115] Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers. Hal : 47

[116] Effendi, N. (2000). "Pasar Tradisional Minangkabau: Institusi Ekonomi dan Arena Kultural di Perdesaan Sumatera Barat". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 24(62), 45–58.

memberikan dasar legitimasi moral dan sosial bagi penguasa adat (*ninik mamak*) untuk mengatur tata ruang dan tata tertib pasar. Ruang fisik pasar diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan hirarki sosial dan jenis komoditas yang diperdagangkan, mulai dari area bahan basah, hasil bumi, hingga barang-barang kerajinan lokal. Pada peralihan menuju masa Orde Baru pertengahan tahun 1960-an, kondisi fisik Pasar Balai Tangah masih sangat bersahaja dan menunjukkan karakter fisik tradisional yang kental. Bangunan penunjang transaksi sebagian besar terdiri atas *los-los* beratap seng atau ijuk dengan struktur kayu sederhana, serta deretan lapak portabel (*ataran*) dari bambu yang didirikan secara independen oleh para pedagang harian. Belum tersedianya drainase yang permanen dan sarana sanitasi memadai membuat kondisi fisik pasar sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kendati demikian, keterbatasan fisik tersebut tidak mengurangi volume aktivitas ekonomi yang berlangsung pada setiap hari pasar [117].

Secara keseluruhan, pada awal Orde Baru, Pasar Balai Tangah bukan sekadar arena transaksi jual-beli rupiah dan barang, melainkan manifestasi dari kelembagaan sosio-ekonomi nagari yang berakar kuat dalam sejarah Minangkabau. Pasar ini berfungsi sebagai barometer kesejahteraan rakyat perdesaan Lintau Buo, di mana pergerakan harga

UIN IMAM BONJOL PADANG

[117] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. (1975). *Tanah Datar dalam Angka 1975*. Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar.

barang di Balai Tangah secara langsung mencerminkan kondisi ketahanan pangan dan hasil panen lokal. Landasan historis dan kultural inilah yang kemudian menjadi modal sosial utama masyarakat Lintau Buo dalam memasuki era baru modernisasi dan stabilisasi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru.

Pelaksanaan hari *pekan* setiap hari Kamis di Pasar Balai Tangah secara perlahan kembali menjadi magnet denyut nadi perekonomian kawasan Lintau Buo Utara. Para petani, pengerajin, dan pedagang eceran kembali memadati area pasar dengan tingkat partisipasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Terjaminnya keamanan lalu lintas barang di sepanjang koridor Batusangkar ,Lintau Pay akumbuh memungkinkan mobilisasi komoditas pertanian dapat mengalir secara konstan,sehingga kelangkaan pasokan pangan dasar di tingkat lokal dapat teratasi [118].

Secara historiografis, periode transisi 1966–1970-an di Pasar Balai Tangah menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara stabilitas makro politik nasional dengan ketahanan ekonomi mikro di perdesaan. Keberhasilan rezim Orde Baru menanamkan hegemoninya hingga tingkat nagari memberikan fondasi dasar bagi pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi terencana (Repelita) pada dekade-dekade berikutnya. Pasar Balai Tangah pun siap

UIN IMAM BONJOL PADANG

[118] Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media. Hal : 68

bertransformasi dari pasar nagari tradisional menuju pasar kecamatan yang terintegrasi dalam sistem ekonomi pasar nasional[119].

b. Kebijakan Pembangunan dan Modernisasi Infrastruktur Pasar (1970-an – 1980-an)

Penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) oleh pemerintah Orde Baru sejak akhir dekade 1960-an membawa paradigma baru dalam pembangunan ekonomi perdesaan Indonesia, termasuk perbaikan sarana perdagangan rakyat. Salah satu instrumen kebijakan strategis yang menyasar langsung peningkatan fungsi pasar tradisional adalah Instruksi Presiden (Inpres) Pembangunan Pasar. Melalui skema alokasi dana Inpres ini, pemerintah pusat secara terencana mengucurkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah untuk merenovasi dan modernisasi fisik pasar-pasar kecamatan .[120]

Pasar Balai Tangah mulai menyerap program modernisasi fisik ini pada pertengahan dekade 1970-an hingga puncaknya pada pertengahan 1980-an. Penataan fisik difokuskan pada pengubahan struktur bangunan pasar dari yang semula semi-permanen dan bersahaja menjadi bangunan permanen berstruktur beton dan atap seng gelombang. *Los-los* kayu lama digantikan oleh *los* semen beratap kuat yang dikelompokkan berdasarkan jenis komoditas

UIN IMAM BONJOL PADANG

[119] Amran, R. (1985). *Sumatera Barat hingga 1908: Awal Perubahan Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Yasaguna. Hal : 78

[120] Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Manggarai.Hal : 56

dagangan, seperti *los* daging, *los* sayur-mayur, dan *los* barang harian[121].

Selain pembangunan *los* terbuka, pemerintah daerah merencanakan pembangunan deretan kios-kios permanen di sepanjang pinggir jalan utama pasar. Kios-kios ini ditujukan untuk disewakan kepada pedagang tetap yang menjual barang-barang tahan lama seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, dan barang kelontong. Penataan ini bertujuan meningkatkan kerapian tata ruang pasar serta mencegah kemacetan lalu lintas yang melimpah ke badan jalan pada hari *pekan* (Kamis).[122]

Program modernisasi ini juga mencakup penyediaan fasilitas penunjang seperti pembuatan sarana sanitasi (mandi, cuci, kakus), penyediaan tempat penampungan sampah sementara, serta pemasangan jaringan listrik negara (PLN) ke area kios pasar. Intervensi infrastruktur ini berhasil meningkatkan standar higiene dan kenyamanan, baik bagi para pedagang yang beraktivitas seharian maupun bagi ribuan pengunjung yang datang dari berbagai jorong di Lintau Buo Utara [123].

Meskipun renovasi fisik melalui program Inpres Pasar mengubah wajah arsitektural Pasar Balai Tangah menjadi lebih modern dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[121] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. (1985). *Tanah Datar dalam Angka 1985*. Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar.

[122] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. (1988). *Laporan Fasilitas dan Sarana Perdagangan Kecamatan Lintau Buo*. Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar.

[123] Effendi, N. (2000). "Pasar Tradisional Minangkabau: Institusi Ekonomi dan Arena Kultural di Perdesaan Sumatera Barat". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 24(62), 45–58.

tertata, karakter dasar pasar sebagai tempat bertemunya tradisi dan interaksi sosial tetap bertahan. Modernisasi fisik ini tidak menghilangkan esensi pasar tradisional, melainkan justru memperbesar kapasitas daya tampung pasar dalam merespons lonjakan arus barang dan manusia yang terakselerasi oleh keberhasilan pembangunan ekonomi Orde Baru [124].

Pembangunan fisik sarana pasar tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh modernisasi prasarana transportasi darat. Pada masa awal Orde Baru, kondisi jalan penghubung dari Lintau ke pusat-pusat kota seperti Batusangkar dan Payakumbuh masih berupa jalan berbatu yang rusak dan sukar dilalui kendaraan bermotor, terutama pada musim penghujan. Kondisi ini membatasi mobilitas barang dan melonjakkan biaya angkut komoditas pertanian.

Sejak dimulainya Repelita II dan III (pertengahan 1970-an hingga 1980-an), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memprioritaskan pengaspalan dan pelebaran jalan raya koridor Lintau–Batusangkar serta Lintau–Payakumbuh. Pembangunan jembatan-jembatan beton permanen menggantikan jembatan kayu kuno memperlancar keterhubungan antar-wilayah. Langkah ini secara drastis memangkas waktu tempuh perjalanan dari jam-jaman menjadi hitungan menit [125].

UIN IMAM BONJOL PADANG

[124] Asnan, G. (2007). *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 46

[125] Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat. (1982). *Laporan Pembangunan Jalan dan Jembatan Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Padang: Dinas PU Sumatera Barat.

Dampak langsung dari perbaikan jalan ini adalah terjadinya revolusi moda transportasi di Kecamatan Lintau Buo Utara. Moda transportasi tradisional berbasis tenaga hewan seperti kuda beban dan pedati, serta bus-bus tua bermesin disel, secara bertahap digantikan oleh armada angkutan pedesaan modern seperti *oplet*, minibus Colt diesel, serta truk-truk engkel pengangkut muatan berat. Kehadiran angkutan umum berjadwal ini memfasilitasi mobilitas pedagang dan pembeli menuju Pasar Balai Tangah setiap hari Kamis [126].

Sistem transaksi yang pada era awal Orde Baru masih sesekali diwarnai oleh mekanisme pertukaran barang secara semi-barter antar-petani di tingkat lokal, pada dekade 1980-an telah sepenuhnya bergeser menuju transaksi tunai moneter secara mutlak menggunakan uang Rupiah. Penetrasi lembaga keuangan seperti Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa di sekitar area pasar turut memfasilitasi sirkulasi uang kartal dan penyediaan kredit usaha bagi para pedagang pasar [127].

Perubahan paling mencolok terlihat dari masuknya gelombang produk-produk manufaktur modern buatan pabrik ke toko-toko dan kios-kios di Pasar Balai Tangah. Barang-barang impor dan hasil industri dalam negeri seperti pakaian jadi (*konveksi*), alas kaki sintetis, peralatan dapur berbahan plastik dan aluminium, serta kosmetik

UIN IMAM BONJOL PADANG

[126] Naim, M. (1979). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.Hal : 59

[127] World Bank. (1985). *Indonesia: Rural Credit and Market Development Infrastructure Report*. Washington, D.C.: The World Bank.

buatan pabrik mulai menggeser dominasi barang-barang kerajinan tradisional buatan lokal [128]. Selain produk kebutuhan harian, kios-kios di Balai Tangah mulai menjajakan barang-barang bernilai tinggi (*durable goods*) seperti radio transistor, televisi hitam-putih, jam tangan, hingga perlengkapan sepeda motor. Kepemilikan moda transportasi pribadi seperti sepeda motor Honda C70 atau Yamaha Bebek yang dibeli warga dari hasil penjualan komoditas di pasar menjadi simbol status sosial baru di perdesaan Lintau [129]. Perubahan pola konsumsi ini mencerminkan terjadinya proses modernisasi dan integrasi masyarakat perdesaan Lintau Buo ke dalam arus kebudayaan konsumen nasional Orde Baru. Pasar Balai Tangah berfungsi sebagai agen perubahan budaya material, di mana barang barang ma nufaktur modern yang import dip rkenalkan, diperjualbelikan, dan diserap ke dalam kehidupan sehari-hari warga nagari .

UIN IMAM BONJOL PADANG

c. Dinamika Kelembagaan dan Tata Kelola Pasar Balai Tangah

Sebelum diberlakukannya penataan keseragaman sistem pemerintahan desa secara nasional pada akhir dekade 1970-an, tata kelola Pasar Balai Tangah berada sepenuhnya di bawah naungan struktur adat nagari Minangkabau. Pengelolaan pasar diatur secara kolegial oleh *Ninik Mamak* pemangku adat dari suku-suku yang ada di Nagari Balai Tangah melalui wadah Kerapatan Adat Nagari

[128] Effendi, N. (2000). "Pasar Tradisional Minangkabau: Institusi Ekonomi dan Arena Kultural di Perdesaan Sumatera Barat". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 24(62), 45–58.

[129] Dick, H. (2002). *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. Honolulu: University of Hawaii Press. Hal : 79

(KAN). Legitimasi pengelolaan ini bersumber pada hukum adat *pasa dalam nagari* yang menempatkan pasar sebagai aset komunal (*harta pusako tinggi*) milik nagari .[130]

Dalam sistem pengelolaan tradisional ini, *Ninik Mamak* menunjuk pemangku adat atau tokoh masyarakat berpengaruh untuk bertindak sebagai pengelola harian atau *penghulu pasar/petinggi balai*. Pengelola ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban area pasar, mengalokasikan lapak dagang bagi warga lokal maupun pendatang, serta menyelesaikan perselisihan atau sengketa dagang yang terjadi di lingkungan pasar berdasarkan prinsip *musyawarah dan mufakat* [131].

Sistem penarikan pemungutan dari pedagang pada era ini bersifat informal dan berasaskan kepatuhan adat. Uang sumbangan atau retribusi tradisional yang dipungut dari para pedagang sering disebut sebagai *bunga balai* atau *uang los* ditujukan untuk membiayai kebersihan pasar, upah penjaga malam, serta disisihkan sebagai kas keuangaan nagari. Dana kas nagari hasil retribusi pasar ini dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan musala, mesjid nagari, atau jalan setapak jorong [132]. Hubungan antara para pedagang dengan pengelola pasar berbasis adat dicirikan oleh ikatan keorganisasian yang luwes dan sarat nilai-nilai kekeluargaan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[130] Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers. Hal : 89

[131] Effendi, N. (2000). "Pasar Tradisional Minangkabau: Institusi Ekonomi dan Arena Kultural di Perdesaan Sumatera Barat". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 24(62), 45–58.

[132] Amran, R. (1985). *Sumatera Barat hingga 1908: Awal Perubahan Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Yasaguna. Hal : 72

Aturan berdagang tidak tertulis dalam lembaran hukum formal, melainkan disepakati melalui konsensus moral dan etikaMinangkabau yang menekankan prinsip saling menguntungkan dan menghormati hak-hak tanah ulayat nagari [133].

Secara umum, tata kelola Pasar Balai Tangah sebelum tahun 1979 mencerminkan otonomi asli nagari di Sumatera Barat. Pasar berfungsi sebagai institusi ekonomi-adat yang mandiri, di mana intervensi pemerintah daerah masih bersifat terbatas dan dominasi elit adat dalam mengendalikan aset-aset strategis nagari masih terpelihara dengan kuat [134].

Pengundangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa oleh rezim Orde Baru menjadi titik balik historis yang merestrukturisasi tatanan sosial-politik di Sumatera Barat. Kebijakan ini memecah struktur pemerintahan Nagari yang historis dan utuh menjadi beberapa unit "Pemerintah Desa" yang diseragamkan mengikuti pola Jawa. Di Kecamatan Lintau Buo Utara, wilayah Nagari Balai Tangah terpecah menjadi beberapa desa administratif, yang mengakibatkan terfragmentasinya kewenangan adat [135].

UIN IMAM BONJOL PADANG

[133] Naim, M. (1979). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal : 37

[134] Kahin, A. R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 64

[135] Kahin, A. R. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926–1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal : 78

Penerapan UU No. 5/1979 berdampak langsung pada pergeseran penguasaan dan pengelolaan Pasar Balai Tangah. Kehadiran birokrasi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar secara sistematis menggeser posisi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan *Ninik Mamak* dari hierarki pengambil keputusan pasar. Pasar Balai Tangah yang sebelumnya dipandang sebagai aset komunal ulayat nagari dialihkan statusnya menjadi aset publik di bawah pengawasan dinas pasar daerah [136].

Pemerintah daerah menempatkan struktur birokrasi formal di pasar melalui penunjukan Kepala Pasar (*Mantri Pasar*) yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pasar Kabupaten Tanah Datar dan Camat Lintau Buo. Mantri Pasar memegang kendali atas operasional harian, pendaftaran kios, penataan pedagang, hingga koordinasi keamanan bekerja sama dengan aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat [137].

UIN IMAM BONJOL PADANG

Marginalisasi peran *Ninik Mamak* dalam tata kelola pasar ini sempat memicu ketegangan yang tenang namun mendalam (*hidden resistance*) antara elit adat nagari dengan birokrasi pemerintah. *Ninik Mamak* menganggap tindakan penyeragaman dan pengambilalihan pasar oleh negara sebagai pengikis atas hak-hak ulayat nagari, sementara pemerintah Orde Baru mengintrodusirnya atas nama

[136] Effendi, N. (2000). "Pasar Tradisional Minangkabau: Institusi Ekonomi dan Arena Kultural di Perdesaan Sumatera Barat". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 24(62), 45–58.
[137] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. (1985). *Tanah Datar dalam Angka 1985*. Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar.

efisiensi birokrasi dan modernisasi administrasi pembangunan .[138] Restrukturisasi kelembagaan ini menandai berakhirnya era otonomi adat penuh dalam pengelolaan Pasar Balai Tangah. Penyeragaman administrasi desa berhasil mengintegrasikan pengelolaan pasar tradisional ke dalam struktur kekuasaan negara Orde Baru yang sentralistis dan hirarkis, di mana aturan-aturan formal menggantikan konsensus tradisional adat [139].

Seiring dengan formalisasi birokrasi pasar pasca-1979, mekanisme pemungutan keuangan di Pasar Balai Tangah ditata kembali melalui payung hukum Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar. Penarikan biaya berdagang yang sebelumnya bersifat konvensional diubah menjadi sistem retribusi pasar resmi menggunakan karcis/kuitansi berseri yang dicetak oleh Pemerintah Daerah [140].

Setiap hari *pekan* (Kamis), petugas penarik retribusi dari Dinas Pasar yang dibantu oleh staf Pemerintah Desa melakukan penyisiran ke seluruh area pasar. Pemungutan retribusi dikategorikan berdasarkan kelas fasilitas yang digunakan, mulai dari retribusi kios permanen, retribusi *los* beton, hingga retribusi kebersihan/lapak untuk pedagang kaki lima (*ataran*). Besaran tarif retribusi diatur secara berkala disesuaikan dengan tingkat inflasi dan jenis barang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[138] Effendi, N. (2000). "Pasar Tradisional Minangkabau: Institusi Ekonomi dan Arena Kultural di Perdesaan Sumatera Barat". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 24(62), 45–58.
[139] Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia* (Revised Edition). Singapore: Equinox Publishing. Hal : 67
[140] Dinas Pasar Kabupaten Tanah Datar. (1985). *Penataan dan Pengelolaan Pasar-Pasar Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar*. Batusangkar: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

dagangan[141]. Pendapatan dari hasil pemungutan retribusi Pasar Balai Tangah dialokasikan menjadi salah satu kontributor penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. Sebagian dari porsi retribusi tersebut dikembalikan ke tingkat lokal dalam bentuk Alokasi Dana Desa guna membiayai operasional Pemerintahan Desa Balai Tangah serta perawatan infrastruktur fisik pasar [142].

d. Dampak Krisis Moneter (1997-1998)dan Perlawanan Ekonomi Rakyat di Akhir Orde Baru

Guncangan hebat Krisis Moneter (Krismon) yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997 memicu kejatuhan nilai tukar Rupiah, melambungnya inflasi, dan runtuhnya sektor perekonomian formal di kota-kota besar. Dampak makroekonomi ini dengan cepat menjalar ke kawasan perdesaan di Sumatera Barat, termasuk Kecamatan Lintau Buo Utara. Lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok impor dan pupuk buatan pabrik sempat memukul daya beli masyarakat perdesaan di Pasar Balai Tangah pada awal krisis [143].

Kendati demikian, dalam perkembangannya, Pasar Balai Tangah memperlihatkan resiliensi (daya tahan) perekonomian rakyat yang luar biasa di tengah krisis. Berbeda dengan kota-kota besar yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[141] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. (1988). *Laporan Fasilitas dan Sarana Perdagangan Kecamatan Lintau Buo*. Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar.
[142] Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media. Hal : 71
[143] Hill, H. (1999). *The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences, and Lessons*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Hal : 44

mengalami kelumpuhan ekonomi, sektor pertanian dan perkebunan rakyat di Lintau Buo justru mendapat keuntungan kompetitif dari depresiasi nilai Rupiah. Para petani komoditas ekspor seperti cengkeh, kopi, dan karet yang menjual hasilnya di Balai Tangah menikmati lonjakan penerimaan Rupiah yang signifikan [144].

Fenomena krisis ini memicu gelombang kepulangan para perantau Minangkabau dari kota-kota besar (*mubalig / pulang kampuang*) akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal perkotaan. Kehadiran para perantau yang kembali ke nagari ini diserap oleh sektor ekonomi informal dan agraris di Lintau. Pasar Balai Tangah menjadi wadah penampung bagi para mantan perantau ini untuk memulai usaha perdagangan kecil-kecilan demi bertahan hidup[145].

Pasar Balai Tangah terbukti bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir (*buffer network*) bagi ketahanan pangan dan ekonomi rakyat Lintau Buo Utara di akhir masa Orde Baru. Keberadaan jaringan pangan lokal menjamin ketersediaan bahan makanan pokok seperti beras, sayuran, dan lauk-pauk dengan harga yang relatif lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga di pusat perkotaan . Ketika rezim Orde Baru akhirnya runtuh pada Mei 1998 yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto, Pasar Balai Tangah tetap

UIN IMAM BONJOL PADANG

[144] Effendi, N. (2000). "Pasar Tradisional Minangkabau: Institusi Ekonomi dan Arena Kultural di Perdesaan Sumatera Barat". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 24(62), 45–58.

[145] Naim, M. (1979). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal : 81

berdiri kokoh dan beroperasi dengan dinamis. Resiliensi pasar tradisional ini membuktikan bahwa institusi ekonomi rakyat yang berakar pada tradisi agraris dan solidaritas nagari memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi guncangan krisis ekonomi nasional.[146]

3. Pasar Tradisional Balai Tangah Pada Masa Era Reformasi (1998-2020)

a. Dampak Krisis Moneter 1998 dan Transisi Awal Era Reformasi (1998-2004)

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 dan memuncak pada tahun 1998 berdampak signifikan terhadap konstelasi perekonomian di wilayah pedesaan Sumatera Barat, tak terkecuali di Kecamatan Lintau Buo Utara. Lonjakan inflasi nasional yang disertai melemahnya nilai tukar Rupiah memicu kenaikan harga bahan pokok secara drastis, sehingga menurunkan daya beli masyarakat secara umum [147].

UIN IMAM BONJOL PADANG

Mayoritas masyarakat Lintau Buo Utara yang mengandalkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan dihadapkan pada ketidakpastian harga input produksi seperti pupuk dan pestisida yang mengalami lonjakan harga berlipat ganda. Dalam konteks ini, Pasar Tradisional Balai Tangah menjadi ruang utama yang merefleksikan

---

[146] Dick, H. (2002). *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. Honolulu: University of Hawaii Press.Hal : 57

[147] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. (2000). *Kecamatan Lintau Buo Dalam Angka 2000*. Batusangkar: BPS Kabupaten Tanah Datar.

daya tahan (*resilience*) dan tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat nagari di Lintau Buo Utara.

Menurut Dasheri memasuki masa reformasi sekitar tahun 1998, Pasar Balai Tangah mengalami perubahan yang cukup terasa, terutama dalam hal pengelolaan dan kegiatan perdagangan. Beberapa pedagang lama yang sudah berjualan sejak masa sebelumnya sering menceritakan bahwa suasana pasar saat itu masih sangat sederhana, tetapi mulai ada kebebasan dalam berdagang. Tidak seperti masa sebelumnya yang serba diatur ketat, pada masa reformasi para pedagang merasa lebih leluasa menentukan jenis dagangan dan cara berjualan.[148]

Menurut cerita pedagang tua di pasar, awal reformasi masa yang agak sulit. Kondisi ekonomi yang belumn stabil membuat harga barang sering naik turun. Namun, justru pada masa itu Pasar Balai Tangah tetap menjadi tempat utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun daya beli masyarakat menurun, kegiatan pasar tidak benar-benar sepi. Pasar tetap hidup karena masyarakat Sungai Aur masih sangat bergantung pada pasar tradisional. sering menceritakan bahwa suasana pasar saat itu masih sangat sederhana, tetapi mulai ada kebebasan dalam berdagang. Tidak seperti masa sebelumnya yang serba diatur ketat, pada masa reformasi para pedagang merasa lebih leluasa menentukan jenis dagangan dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[148] Dasheri, Wawancara Pribadi dengan Bapak Wali Nagari Balai Tangah , Kamis,02 Juli 2026

cara berjualan. Memasuki rentang tahun 1998 hingga 2004, struktur komoditas yang diperdagangkan di Pasar Balai Tangah mengalami pergeseran yang cukup mencolok sebagai respons atas penurunan daya beli riil masyarakat. Pedagang barang-barang manufaktur dan sekunder, seperti pakaian jadi dan peralatan rumah tangga olahan pabrik, mengalami penurunan omzet yang tajam sehingga sebagian dari mereka terpaksa gulung tikar atau beralih menjual komoditas pangan lokal. Aktivitas perdagangan pada hari pasar (*Hari Pasa*) yang jatuh setiap hari Kamis terfokus pada pemenuhan kebutuhan bahan pangan dasar dan komoditas pertanian segar.[149]

Di sisi lain, Pasar Balai Tangah memperkuat perannya tidak hanya sebagai pusat distribusi barang konsumen dari kota-kota seperti Batusangkar, Payakumbuh, dan Bukittinggi ke wilayah perdesaan, melainkan juga sebagai *collecting center* (pusat pengumpul) hasil bumi. Para pedagang pengumpul (*toke*) memanfaatkan momentum pasar mingguan ini untuk menyerap komoditas karet, kakao, dan beras lokal dari para petani Lintau sebelum didistribusikan ke tingkat regional. Seiring dengan terbukanya keran kebebasan berkumpul pada awal Reformasi, para pedagang di Pasar Balai Tangah juga mulai membentuk asosiasi informal untuk menegosiasikan tarif retribusi dan penataan lapak secara lebih partisipatif.[150]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[149] Zed, M. (2003). *Kepailitan Ekonomi dan Krisis Sosio-Politik Indonesia 1997–1998*. Padang: UNP Press. Hal : 61

[150] Amran, R. (1985). *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal : 46

b. Dinamika Tata Kelola: Implikasi Otonomi Daerah dan Peran Nagari (2004 - 2012)

Menurut Jimmi Seiring berjalannya waktu, sekitar awal tahun 2000-an, Pasar Balai Tangah mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Jumlah pedagang bertambah, tidak hanya pedagang kebutuhan pokok seperti beras, sayur, dan ikan, tetapi juga pedagang pakaian, peralatan rumah tangga, serta hasil kebun masyarakat sekitar. Beberapa pedagang mengatakan bahwa pasar mulai ramai pada hari-hari tertentu, terutama saat hari pasar, ketika masyarakat dari jorong-jorong sekitar datang untuk belanja. Pada masa ini pula, peran pemerintah nagari kecamatan mulai terlihat dalam upaya penataan pasar. Walaupun masih terbatas, sudah ada perhatian terhadap kebersihan dan ketertiban pasar. Para pedagang mengenang bahwa sebelumnya mereka berjualan tanpa lapak tetap, tetapi kemudian mulai diarahkan untuk menempati tempat-tempat tertentu agar pasar terlihat lebih teratur. Meski demikian, proses penataan ini tidak selalu berjalan mulus, karena sebagian pedagang merasa kawatir kehilangan pembeli jika harus berpindah tempat[151]

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Kembalinya Pemerintahan Nagari,

UIN IMAM BONJOL PADANG

[151] Jimmi,Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Nagari Balai Tangah , Kamis,02 Juli 2026

membawa implikasi mendasar terhadap tata kelola pasar tradisional. Pengelolaan Pasar Balai Tangah yang sebelumnya sangat terdesentralisasi di bawah kendali dinas pasar pemerintah daerah pada era Orde Baru mulai mengalami renegosiasi struktural. Pemerintah Nagari Balai Tangah menuntut peran dan porsi pengelolaan yang lebih besar atas pasar yang secara sistem adat berdiri di atas *tanah ulayat nagari*.[152]

Kompromi tata kelola kemudian terbangun antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Perindagkop dengan Pemerintah Nagari Balai Tangah demi menghindari kerancuan wewenang. Pemkab Tanah Datar berperan dalam perencanaan makro, regulasi penetapan tarif retribusi daerah, dan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur fisik. Sementara itu, Pemerintah Nagari diberikan hak mengelola kebersihan, ketertiban harian, serta pembagian hasil retribusi pasar untuk kas nagari . Pola kedaulatan bersama ini berhasil menciptakan mekanisme pengelolaan pasar yang lebih akuntabel dan berbasis pada kearifan lokal.[153]

Eksistensi Pasar Balai Tangah dalam kebudayaan Minangkabau tidak sekadar dipandang sebagai instrumen ekonomi semata, melainkan merupakan bagian integral dari *aset nagari* yang sarat akan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[152] Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2006). *Dynamics of Decentralization: Change in Nagari Governance in West Sumatra*. Berlin: Max Planck Institute for Social Anthropology. Hal : 76

[153] Putra, H. R. (2016). *Perkembangan Pasar Pekan Kamis Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Agam 1998-2015*. Skripsi, Jurusan Sejarah, Universitas Andalas, Padang. Hal : 45

nilai-nilai adat dan kelembagaan lokal. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Balai Tangah memegang peranan kunci dalam mengawasi pemanfaatan tanah ulayat pasar agar tetap memberikan kemaslahatan bagi anak nagari. Penataan kepemilikan atau hak sewa atas los dan lapak dagang selalu mengikutsertakan pertimbangan dari *niniak mamak* (pemangku adat) guna mencegah penguasaan lahan pasar oleh pihak luar yang berpotensi merugikan pedagang lokal.[154]

Dalam hal penyelesaian sengketa antar-pedagang, seperti perselisihan batas lapak maupun pemindahan lokasi berdagang, KAN bersama tokoh masyarakat senantiasa mengedepankan mekanisme musyawarah mufakat di tingkat nagari sebelum menempuh jalur hukum formal. Pendekatan persuasif yang berbasis pada norma adat (*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*) ini berhasil menjaga kondusivitas stabilitas keamanan pasar. Hubungan erat antara pemangku adat, pemerintah nagari, dan asosiasi pedagang menjadi benteng sosial yang kokoh dalam mempertahankan keberlangsungan Pasar Balai Tangah di tengah arus transisi regulasi.[155]

Memasuki tahun 2010-an, Pasar Balai Tangah menghadapi tantangan baru. Munculnya toko-toko kecil dan pedagang keliling sedikit banyak mempengaruhi jumlah pembeli di pasar. Namun, menurut pengakuan pedagang, pasar tradisional tetap memiliki

UIN IMAM BONJOL PADANG

[154] Siddik, A. (1984). *Hukum Adat Nagari dan Pengembangannya di Sumatera Barat*. Padang: Angkasa Raya. Hal : 66

[155] Putra, I. E. (2017). *Perkembangan Pasar Ibuh Kota Payakumbuh Tahun 1985-2013*. Skripsi, Jurusan Sejarah, Universitas Andalas, Padang. Hal : 64

keunggulan tersendiri. Hubungan antara pedagang dan pembeli yang sudah saling mengenal membuat transaksi jual beli di pasar terasa lebih akrab. Proses tawar-menawar masih menjadi cirri khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain.

c. Perkembangan Fisik,Infrastruktur,dan Aktifitas Sosio - Ekonomi (2012-2017)

Mengatasi pesatnya pertumbuhan jumlah pedagang dan pembeli yang memicu kemacetan di jalan utama Lintau, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Nagari Balai Tangah mengintervensi pembangunan fisik pasar secara masif pada kurun waktu 2012–2017. Program revitalisasi ini difokuskan pada pembagian zonasi pasar melalui pembangunan los basah (khusus daging, ikan, dan sayuran) serta los kering (pakaian dan barang kelontong) yang lebih teratur dan higienis. Penataan saluran drainase dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah terpadu turut ditingkatkan untuk memperbaiki sanitasi lingkungan pasar.[156]

Selain perbaikan bagian dalam pasar, modernisasi fisik ini diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas transportasi di kawasan sekitarnya. Pengaspalan ruas jalan penghubung Batusangkar–Lintau dan penyediaan terminal angkutan pedesaan (angdes) serta pangkalan ojek di sekitar area pasar meningkatkan mobilitas pasokan barang dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[156] Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar. (2015). *Laporan Evaluasi Sarana dan Prasarana Pasar Nagari Kabupaten Tanah Datar*. Batusangkar: Pemkab Tanah Datar.

kedatangan pengunjung. Integrasi infrastruktur jalan dan sarana transportasi publik ini memperluas jangkauan pasar, menjadikan Pasar Balai Tangah sebagai titik simpul perdagangan utama di wilayah Lintau Buo Utara dan sekitarnya.[157]

Menurut Dasheri Di samping fungsi resiprositas ekonomi, Pasar Balai Tangah pada rentang 2012-2017 memantapkan posisinya sebagai *social hub* atau pusat interaksi sosio-kultural masyarakat Lintau. Pada hari pasar, arena pasar tidak hanya dipenuhi oleh transaksi jual-beli, tetapi juga menjadi wahana pertukaran informasi sosial, diskusi isu-isu lokal, dan silaturahmi antar-warga jorong melalui tradisi *ota di warung kopi*. Kehadiran warung-warung kopi di pinggir pasar menciptakan ruang publik yang inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, pedagang, hingga tokoh adat dan pamong nagari.[158]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Keberadaan pasar tradisional ini juga memainkan peran vital dalam merawat kebudayaan dan tradisi kuliner lokal Minangkabau. Berbagai jenis jajanan tradisional dan masakan khas Lintau, seperti *samba lado tanak*, *miso*, dan *lamang*, dijajakan secara turun-temurun dan menjadi daya tarik sosial-kuliner tersendiri. Pasar Balai Tangah dengan demikian melampaui aspek materialistik ekonomi, tumbuh menjadi

[157] Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar. (2015). *Laporan Evaluasi Sarana dan Prasarana Pasar Nagari Kabupaten Tanah Datar*. Batusangkar: Pemkab Tanah Datar.
[158] Dasheri,Wawancara Pribadi dengan Bapak Wali Nagari Balai Tangah, Kamis, 02 Juli 2026

ruang kultural yang memelihara memori kolektif dan identitas kebersamaan masyarakat Nagari Balai Tangah.[159]

d. Tantangan Perdagangan Modern,Perubahan Pola Konsumsi,dan Adaptasi Pasar (2017-2020)

Antara tahun 2017 hingga 2019, dinamika perdagangan di Lintau Buo Utara mulai menghadapi tantangan baru seiring dengan masuknya penetrasi minimarket berjejaring dan toko kelontong modern berbasis waralaba/lokal. Kehadiran ritel modern yang menawarkan kenyamanan berbelanja dengan ruangan ber-AC, kepastian harga, serta jam operasional harian yang fleksibel secara perlahan mengubah preferensi belanja masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda. Perubahan pola konsumsi ini mengancam eksistensi pasar tradisional yang pengoperasian utamanya masih bergantung pada siklus hari pasar mingguan.[160]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dampak penetrasi ritel modern dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi (*online shopping*) paling dirasakan oleh para pedagang komoditas non-pangan di Pasar Balai Tangah, seperti pedagang pakaian, sepatu, dan barang elektronik rumah tangga. Banyak dari pedagang sektor ini mengalami penurunan omzet penjualan secara drastis karena sebagian konsumen memilih bertransaksi melalui platform digital atau toko modern harian

---

[159] Pandoe, M. D., & Pour, J. (2010). *Jernih Memilih: Menelusuri Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Kompas Book. Hal : 52

[160] Sudarso. (2010). *Transformasi Perdagangan Ritel dan Dampaknya Terhadap Pasar Tradisional*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal : 56

(Leksono, 2009). Fenomena ini memaksa para pelaku usaha di pasar tradisional untuk mengevaluasi strategi perdagangan dan pola pelayanan mereka agar tidak tergerus oleh arus modernisasi ritel.[161]

Dalam menghadapi tekanan perdagangan modern, para pedagang di Pasar Balai Tangah menerapkan berbagai strategi adaptasi sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal. Pedagang melakukan diversifikasi produk dengan lebih berfokus pada penyediaan bahan pangan segar harian dan bumbu olahan tradisional yang tidak dapat dipenuhi oleh toko ritel modern, serta memanfaatkan aplikasi pesan singkat (WhatsApp) untuk sistem pemesanan barang pra-hari pasar. Selain itu, kerapatan sosial dimanfaatkan melalui penerapan sistem pembayaran fleksibel (*bon* atau utang berbasis rasa saling percaya) kepada pelanggan tetap di jorong-jorong, suatu mekanisme transaksi bernilai resiprositas yang tidak dimiliki oleh ritel modern.[162]

Pada tahun 2020, ketahanan Pasar Balai Tangah diuji lebih jauh oleh merebaknya pandemi COVID-19 yang memicu pembatasan sosial dan protokol kesehatan ketat dari pemerintah daerah. Kendati sempat mengalami penurunan aktivitas dan penurunan omzet yang signifikan pada awal pandemi (periode Maret–Juli 2020), pasar tradisional ini tetap beroperasi secara terbatas sebagai benteng utama ketahanan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[161]Sudarso. (2010). *Transformasi Perdagangan Ritel dan Dampaknya Terhadap Pasar Tradisional*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal : 59

[162] Ramadhan, A., & Kurnia, R. (2024). Kearifan Lokal Minangkabau: Simbiosis Sosial Ekonomi Antara Pasar Nagari dengan Terminal di Sumatera Barat. *JSA (Jurnal Sosiologi Andalas)*, 10(2), 215–228.

pangan masyarakat Lintau Buo Utara (Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Datar, 2020). Kemampuan bertahan Pasar Balai Tangah hingga akhir tahun 2020 membuktikan peran krusialnya sebagai urat nadi ekonomi dan pangan rakyat yang tak tergantikan di tingkat nagari.[163]

C. Dampak Sosial Bagi Masyarakat Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara

Pasar Tradisional Balai Tangah tidak hanya berfungsi sebagai wadah pertukaran barang dan jasa secara ekonomis, melainkan juga berkedudukan sebagai pusat dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat di Nagari Balai Tangah dan sekitarnya. Kehadiran pasar ini secara historis membentuk pola interaksi, pergeseran struktur sosial, serta artikulasi budaya lokal masyarakat Lintau Buo Utara.

1. Pasar Sebagai Ruang Interaksi Sosial Antar Nagari

Secara sosiologis dan historis, keberadaan *Hari Balai* (hari pasar) di Pasar Balai Tangah bertindak sebagai arena pertemuan massa (*public space*) yang melintasi batas-batas administratif antar-nagari di Kecamatan Lintau Buo Utara. Dalam konteks geografis pedesaan Minangkabau, pemukiman warga sering kali terpisah oleh bentang alam dan wilayah adat.

Menurut Dasheri bahwanya Pasar Balai Tangah hadir menjembatani sekat-sekat tersebut dengan menjadi titik kumpul mingguan bagi

[163] Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tanah Datar. (2020). *Laporan Pemantauan Protokol Kesehatan Pasar Tradisional di Kabupaten Tanah Datar*. Batusangkar: Satgas COVID-19.

UIN IMAM BONJOL PADANG

masyarakat Nagari Balai Tangah, Lubuk Jantan, Batu Bulek, Tepi selo dan Tanjuang Bonai hingga kawasan sekitarnya.[164] Pertemuan di pasar tidak sebatas diwarnai oleh transaksi jual-beli, melainkan dipraktikkan sebagai ajang memelihara *tali silaturahmi*, bertukar kabar kekeluargaan, serta mempererat kembali jalinan hubungan antar-kaum (*suku*) yang terpisah secara spasial.[165]

Di samping sebagai ruang perekat hubungan Kekerabatan, Pasar Balai Tangah secara historis memegang peranan krusial sebagai panggung penyebaran informasi komunal (*information hub*) sebelum masifnya media komunikasi digital. Berbagai informasi vital terkait maklumat pimpinan adat (*datuk/niniak mamak*), pengumuman dari pemerintah nagari, berita duka, hingga kabar rencana helat pernikahan warga disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut di area pasar, khususnya di warung-warung kopi (*lapau*). Warung kopi di sekitar Pasar Balai Tangah bertransformasi menjadi ruang wacana publik (*public sphere*) tempat warga berdiskusi secara informal mengenai isu-isu sosial, politik lokal, hingga perkembangan ekonomi kawasan Lintau Buo Utara.

2. Transformasi Peran Emansipasi Ekonomi Prempuan Minangkabau

Sebagai bagian dari tatanan adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilinear, keberadaan Pasar Tradisional Balai Tangah memberi ruang aktualisasi yang luas bagi peran strategis

UIN IMAM BONJOL PADANG

[164] Dasheri,Wawancara pribadi dengan Bapak Wali Nagari Balai Tangah,Kamis ,02 Juli 2026
[165] Asnan, G. (2016). *Pasar di Minangkabau: Sejarah Perekonomian dan Interaksi Sosial Masyarakat Sumatera Barat*. Padang: Unand Press. Hal : 42

perempuan (*Bundo Kanduang* dan kaum perempuan lokal). Pasar menjadi institusi publik tempat perempuan Lintau Buo Utara mengekspresikan peran ekonominya secara mandiri tanpa harus membenturkan diri dengan nilai-nilai adat. Banyak perempuan bertindak sebagai pedagang (*manggaleh*) komoditas hasil bumi, produk olahan pangan tradisional, hingga kain dan kebutuhan rumah tangga. Partisipasi aktif ini menegaskan bahwa perempuan Minangkabau di Lintau tidak sekadar menjadi pengelola rumah tangga di ranah domestik, tetapi juga pilar utama penopang ketahanan ekonomi keluarga.[166]

Menurut Jimmi Keterlibatan langsung kaum perempuan dalam perputaran uang di Pasar Balai Tangah berimplikasi langsung pada peningkatan otonomi finansial mereka. Kemandirian ekonomi yang diperoleh dari aktivitas perdagangan pasar memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun kaum. Keputusan-keputusan strategis terkait biaya pendidikan anak, akses layanan kesehatan, hingga pengelolaan dan pelestarian aset kekayaan keluarga (*harta pusako*) menjadi lebih inklusif dengan keterlibatan aktif pedagang perempuan. Dengan demikian, Pasar Balai Tangah berfungsi sebagai sarana emansipasi ekonomi yang alamiah dan berkelanjutan bagi perempuan lokal.[167]

3. Dinamika Stratifikasi dan Mobilitas Sosial Masyarakat

[166] Naim, M. (2013). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal : 55
[167] Jimmi,Wawancara Pribadi dengan Salah satu Tokoh Masyarakat Nagari Balai Tangah, Kamis, 02 Juli 2026

UIN IMAM BONJOL PADANG

Aktivitas perdagangan yang terus berdenyut di Pasar Balai Tangah mendorong munculnya pergeseran dan diferensiasi dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat nagari, yang semula didominasi oleh sektor agraris (petani subsisten). Keberhasilan mengelola usaha perdagangan di pasar membuka peluang terjadinya mobilitas sosial vertikal (*vertical social mobility*). Petani lokal maupun penggarap lahan yang mengalihkan fokus usahanya menjadi pedagang tetap (*sudagar/saudagar* lokal) mampu meningkatkan akumulasi modal dan kesejahteraan hidupnya. Peningkatan status ekonomi ini secara simultan menaikkan posisi dan penghormatan sosial mereka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di nagari .[168]

Menurut Hadi Selain melahirkan kelas pedagang baru, perkembangan Pasar Balai Tangah juga memicu terciptanya diversifikasi pekerjaan di sektor informal dan jasa pendukung. Kehadiran pasar menyerap tenaga kerja lokal dalam berbagai rantai okupasi, seperti penyedia jasa angkut barang (pendorong gerobak/kuli angkut), pengelola perparkiran, pengemudi transportasi lokal (*bendi* hingga angkutan pedesaan), serta pemilik warung makan dan kopi di sekitar area pasar. Terbentuknya kelompok-kelompok pengerja baru ini memperkaya stratifikasi pekerjaan masyarakat Lintau Buo Utara serta mengurangi

UIN IMAM BONJOL PADANG

[168] Erman, E. (2000). *Pebisnis Lokal dan Politik Daerah: Dinamika Ekonomi Politik di Sumatera Barat*. Jakarta: LIPI Press. Hal : 43

ketergantungan masyarakat semata-mata pada hasil panen pertanian seasonal.[169]

4. Pergeseran Pola Gaya Hidup Masyarakat Lokal

Masuknya komoditas dagang dari luar daerah seperti dari pusat perkotaan Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Padang melalui jalinan pedagang di Pasar Balai Tangah membawa dampak signifikan terhadap pergeseran pola konsumsi masyarakat Lintau Buo Utara. Pasar menjadi pintu masuk (*gateway*) bagi pemenuhan barang-barang manufaktur, pakaian jadi berorientasi modern, peralatan elektronik, hingga bahan pangan olahan pabrikan. Pola konsumsi masyarakat yang pada masa lalu berorientasi subsisten (mengandalkan hasil pemenuhan sendiri) secara bertahap bergeser menjadi pola konsumsi yang lebih variatif dan tergantung pada komoditas pasar[170].

Menurut Hadi Penetrasi komoditas modern tersebut turut memicu modernisasi gaya hidup (*lifestyle*) serta pergeseran orientasi estetika masyarakat pedesaan. Pilihan busana, tren kuliner harian, hingga penggunaan peralatan rumah tangga modern yang ditawarkan oleh para pedagang di Pasar Balai Tangah secara perlahan merubah standar kenyamanan dan gaya hidup warga lokal dari masa ke masa. Meskipun nilai-nilai adat Minangkabau tetap terjaga, kehadiran barang-barang modern melalui pasar tradisional ini membentuk hibriditas budaya

UIN IMAM BONJOL PADANG

[169] Hadi,Wawancara Pribadi dengan Cadiak Pandai Nagari Balai Tangah,Rabu,02 Juli 2026
[170] Evers, H. D. (1991). *Sosiologi Perdagangan: Pasar Tradisional dan Sektor Informal di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. Hal : 47

material, di mana masyarakat Lintau Buo Utara mampu menyelaraskan tradisi lokal dengan pengaruh budaya konsumerisme modern.[171]

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[171] Hadi,Wawancara Pribadi dengan Cadiak Pandai Nagari Balai Tangah,Kamis ,02 Juli 2026